



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan									
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik		7410802033			T=2	P=0	ECTS=4.48	2 8 Desember 2025									
OTORISASI		Pengembang RPS			Koordinator RMK			Koordinator Program Studi									
		Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.			Dr. Bahrul Amiq, S.H., M.H.			PUDJI ASTUTI									
Model Pembelajaran	Case Study																
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																
	CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya															
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan															
	CPL-7	Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab, bermoral, dan berintegritas															
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																	
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan dan memahami Perlindungan Hukum															
	CPMK - 2	Mahasiswa mampu meguraikan dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana Hukum															
	CPMK - 3	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan penegakan hukum di bidang administrasi negara															
Matrik CPL - CPMK																	
		CPMK		CPL-1	CPL-3	CPL-7											
		CPMK-1	✓														
		CPMK-2		✓													
		CPMK-3				✓											
		Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)															
		CPMK		Minggu Ke													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		CPMK-1	✓		✓	✓											
		CPMK-2					✓	✓	✓								
		CPMK-3								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam Penyelenggaraan Negara.																
Pustaka	Utama :																
	1. Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2004. 2. Juniarso Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2009 3. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2016.																
	Pendukung :																
Dosen Pengampu																	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu ]		Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	hybrid			0%
2	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	hybrid			0%
3							0%
4	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	<b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	hybrid			0%
5	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Hybrid			0%
6	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Hybrid			0%
7	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Hybrid			0%
8			<b>Kriteria:</b> mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal Ujian Tengah Semester  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	luring			0%

9	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	hybrid			0%
10	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	<b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	hybrid			0%
11	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	hybrid			0%
12	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana		<b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	hybrid			0%
13	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	hybrid			0%
14	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	hybrid			0%
15	Mahasiswa memahami dan dapat menganalisis Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah yang berakibat ke pertanggungjawaban pdana	Mahasiswa memahami dan dapat menganalisis Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah yang berakibat ke pertanggungjawaban pdana	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa memahami dan dapat menganalisis Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah yang berakibat ke pertanggungjawaban pdana  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	hybrid			0%
16		Mahasiswa mampu mengerjakan semua soal-soal Ujian Akhir Semester	<b>Kriteria:</b> Mahasiswa mampu mengerjakan semua soal-soal Ujian Akhir Semester  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	hybrid			0%

**Rekap Persentase Evaluasi : Case Study**

No	Evaluasi	Persentase
		0%

**Catatan**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposisional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.